

CAKRAWALA LISTRA

Jurnal Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia

ISSN 2503-5037 (Online), Volume 3, Nomor 1 (Januari – Juni 2020); 73 - 94

<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/cakrawalalistra>

KRITIK SOSIAL DALAM NASKAH DRAMA PILKADES KARYA AL GALIH (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)

Wa Ode Sitti Jumiati^{1*}, Irianto Ibrahim²

¹Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

²Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

*waodesittijumiati@gmail.com

Copyright © 2020 CAKRAWALA LISRA: Jurnal Sastra, Bahasa dan Budaya Indonesia



CAKRAWALA LISRA: Jurnal Sastra, Bahasa dan Budaya Indonesia

is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License

Abstrak : Penelitian ini mengkaji naskah yang menceritakan tentang realitas sosial masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari yang terjadi sepanjang tahun 2017. Naskah Drama *Pilkades* Karya Al Galih menarik untuk diteliti menggunakan Kritik Sosial kajian Sosiologi Sastra karena naskah tersebut memuat tentang kritikan terhadap masalah sosial yang terjadi di Kota Kendari. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kritik sosial dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyertakan deskripsi yaitu mendeskripsikan data-data objektif sesuai isi naskah drama *Pilkades* karya Al Galih. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kritik terhadap asmara berupa perilaku seksual, (2) kritik sosial berupa kritik terhadap politik meliputi politik uang, biaya politik, politik kesukuan dan dinasti politik, (3) kritik terhadap etnik berupa kritik terhadap pelaksanaan hukum adat atau *kalosara* dalam masyarakat suku Tolaki.

Kata Kunci: *Drama, Kritik Sosial dan Sosiologi Sastra.*

Abstract: *This research reviewing manuscript which tells about the social reality of the community of Southeast Sulawesi especially Kendari City that occur along the year 2017. Drama Manuscript *Pilkades* of work Al Galih interesting to researched use the social criticism of the study of Sociology of literature because the text load about the criticism of social problems in occur the city of Kendari. The problem reviewed in the research are how does social criticism in drama manuscript in the *Pilkades* of Al Galih. This method research uses qualitative research methods with enclose the description is to describe objective data appropriate with of the drama script in the *Pilkades* of Al Galih. The type of*

this research is the Library research and interview. The result of this research show that (1) criticism of romance in the as of sexual behavior (2) social criticism in the form criticism of political includes money political, cost political, ethnic political and dynasty political, (3) criticism of ethnic in the of criticism to carrying law customary or kalosara in the community of the ethnic Tolaki.

Keyword: *Drama, social criticism and sociology of literature.*

PENDAHULUAN

Naskah drama sebagai karya sastra tersaji dengan bentuk berbeda dari karya sastra lainnya. Penulis naskah drama memiliki rasa kepekaan atas manusia dalam masyarakat yang memiliki sifat dan tingkah laku yang berbeda-beda, terjadinya karya ini juga melalui proses pengamatan dan pengalaman pribadi penulis seputar kehidupan sosialnya. Seperti yang di kemukakan Swingewood bahwa, setiap penulis bekerja dalam suatu tradisi, suatu kebudayaan sastra yang diwarisi, dan karyanya sendiri akan menunjukkan dengan berbagai cara pengaruh dari latar belakang tersebut. Persoalan penting dari hal itu bukanlah pelacakan “pengaruh-pengaruh” dalam suatu cara yang abstrak, tetapi pemahaman mengenai cara-cara yang dengannya seorang penulis tertentu menyerap suatu tradisi dan darinya mengembangkan suara otentiknya sendiri, gagasan-gagasan pandangan sendiri mengenai manusia. Apa yang diciptakannya dari pengaruh-pengaruh tradisi terdahulu itu akan menjadi salah satu petunjuk yang signifikan untuk memahami karyanya secara keseluruhan. Elemen-elemen yang diterima dari tradisi atau ditolak, dikembangkan, dimodifikasi, atau hanya dibiarkan tidak berubah, akan mencerminkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial (Faruk, 2016: 101).

Sosiologi sastra merupakan salah satu teori pengkajian yang titik fokusnya mencangkup ke segala sesuatu yang berada di kehidupan sosial dan dituangkan dalam karya sastra. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Swingewood (dalam Endraswara, 2011: 116) bahwa sosiologi sastra mengungkapkan kehidupan manusia di masyarakat secara objektif, memaknai lambang-lambang sosial dan memahami proses sosial.

Melalui naskah drama *Pilkades*, Al Galih berusaha menghadirkan suasana perpolitikan yang diwarnai isu etnik dan politik uang di Sulawesi Tenggara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat pesta demokrasi (pilkades) masyarakat akan memberikan hak suara kepada kandidat yang menyuapnya. Selain itu, saling menjatuhkan antara lawan politik yang disebabkan oleh perbedaan suku juga masih sering terjadi. Kisah asmara yang menjadi akar masalah juga dihadirkan Al Galih dalam naskah drama

Pilkades selain isu politik uang dan kesukuan. Hal yang menjadi polemik dalam karya ini yaitu politik, asmara, dan etnik.

Naskah drama *Pilkades* mengangkat isu politik pada Sulawesi Tenggara. Drama ini bercerita tentang dua suku yang berpengaruh di area perpolitikan, yaitu Tolaki dan Muna. Naskah ini berlatar pada kota Kendari dan melibatkan 23 pelakon. Naskah *Pilkades* ini telah dipentaskan oleh sanggar teater Ganda Gong Theater pada tanggal 7 April 2018 bertempat di Ampiteater, Taman Kota Kendari. Pentas drama tersebut menarik perhatian beberapa lapisan masyarakat di berbagai kalangan.

Naskah drama *Pilkades* karya Al Galih ini berhasil menghidupkan kondisi sosial yang nyata atau memiliki urutan peristiwa yang dialami oleh manusia dalam masyarakat. Karya naskah drama ini lahir dari pengalaman dan pengetahuan penulis seputar kehidupan sosial yang disertai dengan imajinasi atau sebaliknya. Oleh karena itu, sosiologi sastra cocok untuk membedah karya teks naskah drama *Pilkades* ini dengan berfokus pada kritik sosial.

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini sepenuhnya berasal dari naskah drama *Pilkades* berupa teks yang memuat kritik sosial. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data langsung yang menjadi objek yang akan dikaji yaitu berupa naskah drama *Pilkades* karya Al Galih. Sedangkan sumber data sekunder berupa referensi di luar naskah *Pilkades* seperti buku-buku pengkajian sastra dan kritik sastra yang menjadi data pelengkap atau data tambahan yang dapat membantu penelitian kritik sosial dalam karya sastra.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Melakukan studi pustaka terkait data primer yaitu naskah drama *Pilkades* karya Al Galih dan data sekunder yang berupa buku pengkajian sosiologi sastra dan kritik sastra. Selanjutnya membaca naskah drama *Pilkades* secara berulang-ulang, sehingga peneliti dapat memahami isi naskah. Setelah membaca naskah, penulis lalu mengumpulkan data yang berupa kritik sosial pada naskah drama *Pilkades* karya Al Galih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti mengkaji bentuk-bentuk kritik sosial dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek yang menyimpang, khususnya mengenai perilaku seksual remaja, tindakan politik dan penyalagunaan wewenang terhadap penyelenggaraan hukum adat yang terdapat dalam karya. Kemudian menghubungkan

struktur sastra dengan masyarakat, karya sebagai refleksi sosial kehidupan sosial budaya pengarang yang dihadirkan dalam karya dan hasil wawancara. Objek pada penelitian ini menggambarkan kehidupan sosial yang ada di Sulawesi Tenggara, penulis juga menghidupkan dunia rekaannya dengan menghadirkan penceritaan melalui tokoh-tokoh yang berasal dari dua etnik berbeda.

Pada dasarnya karya sastra merupakan ilmu yang menempatkan karya sastra terhadap aspek-aspek di laur dirinya, yakni masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang besar tentang fungsi-fungsi sastra sebagai produk masyarakat sekaligus menemukan manfaatnya terhadap struktur sosial yang menghasilkannya. Lebih lanjut Swingewood menyatakan bahwa tepatan keilmuan sosiologi sastra yang memindahkannya dari wilayah otonom kekaryaannya sangat relevan mengingat karya sastra tidak lahir dan kekosongan budaya. Karya sastra dapat dikatakan sebagai representasi kebudayaan tertentu (Jurnal Poetika Vol. 1 No.1, Juli 2013).

Swingewood mengatakan bahwa arti 'kebenaran' dari sastra agung dan kelompok sosial berdasar pada 'nilai-nilai otentik' kemanusiaan, yaitu; kebutuhan, aspirasi, dan hasrat yang termediasi melalui interaksi sosial. Sehingga, tugas seorang sosiologi bukan sekedar menemukan refleksi sosial dan histori karya sastra, melainkan juga mengartikulasikan nilai-nilai yang tertanam di dalamnya tertentu (Jurnal Poetika Vol. 1 No.1, Juli 2013).

Swingewood menekankan bahwa nantinya semakin sulit untuk mengadakan analisis terhadap sastra sebagai cerminan masyarakat sebab masyarakat semakin rumit. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, Swingewood beranggapan bahwa pendekatan sosiologi terhadap sastra dapat dilaksanakan sebaik-baiknya asal si kritikus tidak melupakan dua hal: (a) peralatan sastra murni yang dipergunakan pengarang besar untuk menampilkan masalah sosial dalam dunia rekaannya, dan (b) pengarang itu sendiri lengkap dengan kesadaran dan tujuannya (Endraswara, 2011: 275).

Gambaran Umum Naskah

Tema yang dihadirkan oleh Al Galih dalam naskah drama *Pilkades* adalah asmara, etnik, dan politik. Hal ini dapat dilihat dari penceritaan yang menceritakan kisah asmara antara La Seno dan Sorume yang berujung dengan kasus pelecehan seksual. Atas perbuatannya tersebut La Seno dijatuhi hukuman berupa denda adat dengan jumlah yang tinggi disertai penyelesaian secara adat menggunakan kalosara. Permasalahan yang menimpa La Seno berbuntut panjang dengan dibawanya hal tersebut ke dalam ranah politik oleh Langgai yang merupakan ayah dari Sorume, berupa ketua adat yang berpihak kepada Langgai karena khawatir akan

diserang menggunakan *Kinoho* mengenai kebijakan-kebijakannya selama menjadi ketua adat. La Murhum merupakan paman dari La Seno sedangkan Langgai merupakan ayah dari Sorume. Perlu diketahui bahwa La Murhum dan Langgai merupakan kandidat kuat dalam pemilihan kepala desa. Berpihaknya ketua adat kepada Langgai membuat denda yang dibebankan kepada La Seno dibayar mahal. Mahalnya denda yang dibebankan Langgai karena denda tersebut akan digunakan untuk memenuhi biaya politik sebagai calon kepala desa. Berikut urain lebih jelasnya:

Naskah drama *Pilkades* karya Al Galih berkisah mengenai perpolitikan di Sulawesi Tenggara dan menyandingkan dengan isu etnik. Karya ini menjadi media untuk menuangkan ideologi penulis dan menghidupkan dunia rekaannya. Penceritaan naskah drama *Pilkades* karya Al Galih menguak penyimpangan sosial politik dan etnik dari tokoh Langgai dan La Murhum yang akar masalahnya berawal dari kisah asmara tokoh utama yaitu La Seno dan Sorume.

Akar permasalahan dalam karya ini diawali oleh kisah asmara La Seno dan Sorume. Babak pertama berlatar di kebun pepaya, La Seno melakukan perilaku seksual terhadap Sorume. Sebelum La Seno dan Sorume terlena oleh perbuatan mereka, Mowuro yang kebetulan lewat dan menyaksikan hal tersebut tanpa berpikir panjang bergegas menemui dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa, Langgai. Langgai yang merupakan majikan dari Mowuro dan ayah dari Sorume marah besar, Langgai tidak terima dengan perlakuan La Seno terhadap anaknya yang sudah melanggar adat.

La Seno yang merupakan kemenakan dari La Murhum membuat persoalan ini menjadi semakin parah karena La Murhum merupakan lawan politik Langgai dalam pemilihan kepala desa (*Pilkades*). Kasus La Seno dan Sorume yang melanggar adat harus diselesaikan dengan prosesi hukum adat (*kalosara*) yang menjadi lambang persatuan dan perdamaian yang sangat sakral bagi masyarakat etnik Tolaki.

Kasus pelanggaran adat yang dilakukan La Seno dan Sorume serta politik antara Langgai dan La Murhum membuat perang dingin antara kedua kubu yang berasal dari dua suku yang berbeda yaitu Tolaki dan Muna. Kedua kubu tersebut menggunakan karya sastra yaitu puisi sebagai alat politiknya, Langgai dengan *kinoho* dan La Murhum dengan *kantola*. Hal ini membuat Langgai (ketua adat) tertekan, karena *kinoho* Langgai (kepala desa) ditujukan untuk menyerang dan merobohkan pendirian ketua adat serta aksi mogok seks yang diketuai oleh Sartina istri Langgai serta keberpihakan dan dukungan dari ibu-ibu Majelis Talim, Aliansi Wanita Pecinta Sorume, Serikat Sorume dan Koalisi Gadis Malam menambah keruwetan permasalahan ini. Ketua adat yang semula berpihak kepada La

Murhum dikarenakan tekanan atas munculnya *kantola-kantola* panas yang mengulas hubungan gelapnya dengan wanita kota bernama Isabela menjadi berbalik arah mendukung Langgai yang sudah pasti memperoleh kemenangan.

Peran Sartina berpengaruh besar dalam permasalahan ini, Sartina menjadi dalang dari aksi mogok seks dan parade kinoho. Selain itu, Sartina juga merekayasa kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan La Seno terhadap anaknya, Sorume. Perilaku seksual yang dilakukan La Seno terhadap Sorume didasari atas cinta dan suka sama suka, La Seno memetik buah pepaya Sorume dengan dua tangan namun Sartina merekayasanya dengan mendesak Mowuro memberi kesaksian palsu, yaitu mengatakan kepada warga kampung bahwa La Seno memetik buah pepaya Sorume dengan satu tangan yang artinya La Seno memetik paksa buah pepaya Sorume.

Keberpihakan ketua adat kepada kubu Langgai membuat La Seno membayar denda yang tinggi atas perbuatannya kepada Sorume yang sudah melanggar adat. Ketua adat yang memilih berpihak kepada Langgai di karenakan ketua adat melihat celah aman untuk dirinya dengan fakta bahwa masyarakat simpatisan yang berada dipihak Langgai lebih besar dari pada yang berada di pihak La Murhum. Sartina menarik perhatian masyarakat melalui kasus Sorume dan La Seno serta membawanya ke dalam politisasi suaminya dalam Pemilihan kepada desa. Hal ini sebenarnya digunakan oleh Sartina untuk mendapat nominal yang tinggi dari kasus pelecehan terhadap anaknya, sebagai biaya politik Langgai pada pesta *Pilkades*.

Pilkades merupakan naskah drama yang memuat kritik dengan kemasan komedi. Al Galih menghadirkan polemik asmara, politik dan etnik serta sastra daerah dari dua suku yaitu Tolaki dan Muna. Dengan membenturkan antara Kinoho dan Kantola, Al Galih mewujudkan politisasi dan sastra melalui naskah *Pilkades*. Naskah drama *Pilkades* karya Al Galih terpengaruh naskah drama *Lysistrata* oleh Bengkel Teater Rendra yang sama-sama mengangkat aksi mogok seks untuk menghentikan atau meredam konflik, perbedaannya adalah Al Galih mengangkat konflik asmara yang masuk ke dalam ranah politik dibarengi dengan etnis sedangkan Rendra mengangkat konflik sosial, politik, kekuasaan dan seks. Bukan hanya naskah *Lysistrata* (*Cara Jitu Menghentikan Perang*), naskah *Hamlet* (*Hidup Dalam Sel Terkutuk*) oleh Bengkel Teater Rendra pun menjadi inspirasi dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih. Tidak heran mengapa karya-karya Rendra banyak menjadi inspirasi oleh Al Galih yang selama kurang lebih 2 tahun menjadi bagian dan belajar mengenai dunia teater di Bengkel Teater Rendra.

Pengarang

La Ode Muhammad Al Amin atau yang dikenal dengan sebutan Al Galih lahir pada tanggal 12 Mei 1978 di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Al Galih merupakan anak kedua dari tiga bersaudara berasal dari pasangan La Ode Hamado Onta dan Wa Efa. Al Galih besar di Kendari dan menempuh pendidikan di SD 16 Alolama dan pernah pindah ke SD Lahorio, kecamatan Kabawa, Kabupaten Muna selama dua tahun dan kembali untuk menamatkan jenjang sekolah dasarnya di SD 16 Alolama. Selanjutnya, Al Galih menempuh pendidikan menengah pertama di SMP N 8 Kendari dan menempuh jenjang menengah atas di SMA Anduonohu yang sekarang berganti nama menjadi SMA 2 Kendari, setahun kemudian pindah dan menamatkan pendidikan jenjang menengah atasnya SMA Satria.

Al Galih pertama kali mengenal dunia teater saat bergabung dengan Teater Sendiri pada tahun 2001 silam, Teater Sendiri di pimpin oleh Ahmad Zain dengan disiplin latihan yang ketat. Selain belajar di komunitas Teater Sendiri untuk menambah pengetahuan mengenai dramanya, pada tahun 2003 Al Galih bergabung dengan Bengkel Teater Rendra hingga tahun 2005. Setelah menggeluti dunia teater dengan bergabung ke komunitas Teater Sendiri dan Bengkel Teater, Al Galih kembali ke kota Kendari dan mementaskan karya naskah yang pertamanya yang berjudul *Episode Wandiu-diu* yang dipentaskan pada tahun 2012 oleh Kelompok Teras Budaya. Selanjutnya Al Galih mendirikan komunitas kreatif yang berkecimpung di dunia panggung sandiwara, Ganda Gong Theater. Al Galih menjadi ketua Ganda Gong Theater, penulis naskah sekaligus Sutradara dan pelakon pada karya. Pada tahun 2016 mementaskan naskah Spanyol *Pagi Bening* sebagai media perkenalan komunitas Ganda Gong Theater, di tahun yang sama mementaskan lakona *Madona* bekerja sama dengan Komunitas Sastra Muda Kendari. Pada tahun 2018 di umurnya yang ke 40 tahun Al Galih dengan komunitas Ganda Gong Theaternya mementaskan lakon *Pilkades* yang sekaligus menjadi *Masterpiece* dari semua karyanya karena mendapat penikmat paling banyak dan menjadi pementasan teater terbesar di Kota Kendari. Sebagai pekerja seni, Al Galih juga menulis puisi dan cerpen namun satupun belum ada yang dibukukan. Tulisan-tulisan Al Galih berupa puisi dan cerpen hanya dimuat dalam antologi yang di satukan dengan tulisan sastrawan Sulawesi Tenggara lainnya.

Hal yang melatarbelakangi Al Galih menciptakan naskah drama *Pilkades* adalah kondisi perpolitikan di Kendari pada tahun 2017, kritik terhadap hukum adat dan persoalan kesusastaan yang dianggap penting dalam dunia perpolitikan. Sepanjang tahun 2017 kondisi perpolitikan di Sulawesi Tenggara berada pada masa yang menegangkan dengan

terkuaknya hubungan gelap oleh salah satu oknum pemerintah serta aksi suap menyuap dan adanya dinasti politik yang diakhiri dengan penangkapan ayah beserta anak serta adanya praktik politik sukuisme. Hukum adat yang berjalan sudah tidak sesuai dengan koridornya juga turut dilibatkan dalam naskah drama *Pilkades*, dengan mempertemukan dua suku yang menurutnya selalu berseteru dari dulu hingga saat ini (wawancara Al Galih, 7 Maret 2019).

Karya sebagai Refleksi Sosial

Karya sebagai refleksi sosial menurut Swingewood merupakan dokumentasi sastra yang merujuk pada perkembangan jaman. Karya sastra menurut Swingewood adalah dokumentasi sosiobudaya yang dapat digunakan untuk melihat fenomena masyarakat pada masa tersebut (Jurnal Poetika Vol. 1 No.1, Juli 2013). Fenomena sosial yang dihadirkan pengarang melalui karya sastra merupakan hasil dari pengamatan dan pengalaman pribadinya seputar kehidupan sosial. Begitu pula dengan fenomena mengenai tindak perpolitikan dan etnik di Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih. Pengarang mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat kemudian menuangkan serta menyuarakan ideologinya mengenai kehidupan sosial ke dalam sebuah karya sastra.

Naskah drama *Pilkades* karya Al Galih menggambarkan kondisi sosial masyarakat kota Kendari seperti perpolitikan yang bersifat kesukuan dan kawin lari. Kondisi perpolitikan di Sulawesi Tenggara masih diwarnai dengan fanatisme kesukuan di tengah masyarakatnya yang plural atau multikultur. Fanatisme kesukuan atau sukuisme merupakan sikap yang dianut baik oleh pemilih atau pun para caleg. Hal ini dapat terlihat pada kutipan berikut:

Sartina : “Pasti, suku kita ini menyebar sampai di ambon. Desa kita akan menjadi pusat perhatian. Coba saja dia kalau berani tidak berpihak pada sukunya sendiri. Pak, kita sedang bermain politik, bukan bermain ular tangga.” (Galih, 2017: 16).

Fenomena mengenai tindak politik kesukuan dalam naskah drama *Pilkades* serupa dengan kenyataan sosial yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota usai, berhembus kabar yang mengatakan bahwa di Kota Kendari tidak terdapat masyarakat dari salah satu suku tertentu hanya karena calon Walikota dari suku tersebut tidak terpilih.

Selain itu, fenomena kawin lari juga dihadirkan Al Galih dalam naskah drama *Pilkades*. Kawin lari adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis

yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlalu-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal (KBBI V). Kawin lari adalah upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menikah atau hidup bersama, kawin lari biasanya ditempuh oleh orang yang terikat dengan hubungan yang tidak mendapat restu dari orang tua yang acapkali terjadi. Hal ini dapat terlihat pada kutipan berikut:

Sorume :

“Apa? Lari?”

La Seno :

“Tidak ada jalan lain. Inilah saatnya, cinta telah menyuruh kita lari.”

Sorume :

“Tidak, Seno. Ibuku sangat menyayangiku. Aku tak mau membuatnya jatuh sakit.”

La Seno :

“Sorume, percayalah ibumu akan baik-baik saja. Tak maukah kau jadi lebah bersamaku, terbang dan berpelukan sampai di dalam tanah?”

Sorume :

“Tidak, Seno. Barangkali masih ada jalan lain untuk cinta kita selain lari.”

La Seno :

“Sorume, ibumu tak pernah menyetujui cinta kita. Dan untuk penyatuan kita, hanya ada satu jalan, lari dari mereka. Sorume, kita telah terlanjur menempuh jalan-jalan cinta yang gelap. Begitu panjang, betapa jauh. Lihatlah betapa tegarnya kita. Haruskah cinta kita tergelincir hanya karena air mata ibumu?”

Sorume :

“Seno, sekarang aku tak tahu aku harus bagaimana.”

Seno :

“Agar bisa terbang, kita hanya perlu tetap berdekapan. Dan sebagai burung, kita turuti saja kemanapun sayap cinta membawa kita.”
(Galih, 2017: 2).

Selain fenomena sosial di atas, dalam naskah drama *Pilkades* juga terdapat gambaran kondisi sosial masyarakat yaitu masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk menikmati *pongasi* (air alkoholik) dalam setiap mengambil keputusan maupun untuk sekedar mempererat persaudaraan dengan berbincang santai. Hal ini tergambaran pada kutipan dialog berikut.

Lampu perlahan menyala. Di ruang tamu rumah Imore, nampaklah beberapa orang sedang duduk di sana. Ada beberapa botol pongasi di atas meja yang sudah mereka habiskan.

Warga I :

Berteriak ke ruang dalam. "More...! More...!"

More :

Di ruang dalam. "Iya..."

Warga I :

"Utang dulu pongasimu barang lima botol, minggu depan saya bayar." Pada teman-temannya. "Situasi politik mulai menghangat, tepatnya menuju panas. Kayaknya benar, akan ada mogok seks. Kasus La Seno dan Sorume sudah menukik ke ranah politik. Isu itu membuat ketua adat shock. Bukan soal mogoknya, tapi ia merasa loyalitas dan kredibilitasnya diragukan. Tentu saja ia menilai miring pada Sartina dan suaminya, Langgai. Sekarang dia kelihatannya masih berusaha obyektif. Hanya menunggu waktu, ia pasti terang-terangan akan berpihak pada La Murhum

Warga II :

"Kapan sidang adatnya?"

... Warga I :

"Ya... setelah ahli kantola itu sudah ada di desa ini, begitu kesepakatannya antara ketua adat dengan La Murhum." Warga I kemudian terkejut melihat Imore datang dengan berbotol-botol pongasi yang ia dekap di dadanya. Ia menjerit. "Moreee...! (Galih 2017: 18-19).

Pada kutipan dialog di atas terlihat bahwa masyarakat ketika membahas, membicarakan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi dalam lingkungannya disertai dengan menikmati *pongasi* sebagai pendamping yang diyakini dapat membantu untuk memecahkan permasalahan yang ada. *Pongasi* merupakan minuman keras tradisional khas Sulawesi Tenggara yang berasal dari fermentasi beras dan ragi serta memabukkan. Selain dinikmati bersama saat musyawarah dan atau pertemuan, *pongasi* juga seringkali dinikmati pada saat acara pesta pernikahan dilanjutkan dengan *molulo*.

Selain itu, Al Galih juga menghadirkan kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Menurut Swingewood (dalam Jurnal Poetika Vol. 1 No. 1, Juli 2013) bahwa tepatan keilmuan sosiologi sastra yang memindahkannya dari wilayah otonom karya sastra sangat relevan mengingat karya sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Lebih lanjut, karya sastra dapat dikatakan sebagai representasi suatu kebudayaan tertentu. Kebudayaan yang dihadirkan Al

Galih dalam naskah drama *Pilkades* seperti budaya molulo. Molulo adalah tarian umum yang diiringin dengan musik (KBBI V). Budaya molulo ini dapat dikategorikan sebagai budaya lokalitas. Al Galih menghadirkan tradisi kebudayaan masyarakat etnik Tolaki dalam naskah drama *Pilkades* yang berupa tarian. Hal ini terlihat pada kutipan dialog berikut.

La Murhum :

“Orang mau malulo, kau datang lagi dengan perbuatanmu. Kembalikan anak orang!” (Galih 2017: 9)

Malulo atau Lulo merupakan tarian asal etnik Tolaki. Pada zaman dahulu tarian ini dijadikan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan sebagai sarana untuk mencari jodoh. Seiring perkembangannya Lulo tidak hanya dijadikan sebagai media mempererat tali silaturahmi dan mencari jodoh. Akan tetapi, tarian ini juga dijadikan sebagai media hiburan dalam hajatan yang diselenggarakan masyarakat. Selain itu, tarian ini juga seringkali diikuti ke dalam sebuah ajang perlombaan tari tradisional maupun tari kreasi.

Naskah drama *Pilkades* juga menampilkan peranan sastra dalam politik. Al Galih menyadari betul bagaimana sastra yang telah melingkupi ranah perpolitikan, baik untuk kampanye maupun dijadikan sebagai media untuk saling menjatuhkan antara lawan politik seperti yang sering dijumpai di negeri ini. Hal ini digambarkan pada kutipan dialog berikut.

Imore :

“Apa itu kantola?”

Warga I :

“Puisi. Puisi dari Muna.”

Imore :

“Puisi? Seperti kinoho?”

Warga III :

“Yess. Cerdas kamu, sayang!” . . .

Warga I :

“Mantap. Kamu berbakat, More. Siap-siapkin kinohomu untuk serangan balik atas kantola-kantola lawan politik kita. Kamu dipihak kita. Akan kuceritakan bakatmu pada Sartina.” Warga I lalu bergerak ke arah penonton. . . .

Warga I :

“Ini bakal mengerikan. Kayaknya, dua genre puisi baru dalam khasanah kesusastraan kita, akan berperang di lapangan politik. Kita tunggu kabar selanjutnya.” (Galih 2017: 18-20).

Hal tersebut juga ada pada kutipan babak sembilan:

Ketua adat :

. . . Biar saja kalau La Murhum marah dan menyerang saya dengan kantola-kantolanya. Berpihak padanya, tetap juga diserang kinoho-kinoho Sartina. Saya akan ke rumahnya malam ini juga. Besok, semoga aksi mogok dan parade kinoho tidak ada lagi." (Galih 2017: 35).

Kutipan dialog di atas terlihat jelas bahwa sastra telah masuk ke ranah politik. Sastra telah dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan guna menjatuhkan lawan politik. Selain itu, sastra juga telah dijadikan sebagai media untuk mengkritisi pemerintah. *Kinoho* atau *lolama* merupakan puisi lama rakyat Tolaki yang biasanya disampaikan saat acara-acara adat, seperti pesta perkawinan, pesta rakyat, dan acara-acara adat lainnya (Rahmawati dkk, 2010: 22).

Kinoho merupakan pantun pesta rakyat sedangkan *kantola* adalah syair dalam lagu-lagu tradisional daerah Muna (KBBI V). Selain *Kinoho*, terdapat juga *Kantola* yang merupakan prosa liris yang diapresiasi oleh masyarakat Muna sebagai media ekspresi. Sebagai sastra lisan yang berfungsi sebagai media ekspresi, lirik-lirik *kantola* tidak hanya bermuat perasaan dan pengalaman pribadi, tetapi juga berisikan dimensi kemasyarakatan. Oleh karena itu tema lirik *kantola* tidak monoton tetapi bervariasi (Rahmawati dkk, 2010: 138). *Kinoho* dan *Kantola* merupakan jenis puisi lama yang berasal dari suku bangsa yang berbeda sebagai aset kekayaan sastra Indonesia.

Kritik Sosial dalam Naskah

Kritik sosial dalam karya merupakan gambaran atau ungkapan kritikan seorang pengarang mengenai sesuatu yang terjadi pada dirinya ataupun masyarakat di sekelilingnya. Kritik sosial yang di hadirkan oleh Al Gali dalam *Pilkades* berupa kritik terhadap hubungan asmara anak remaja, kritik terhadap politik dan kritik sosial terhadap penyelenggaraan sidang adat *kalosara*.

Kritik sosial adalah tanggapan atau komentar mengenai baik buruknya sesuatu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kritik sosial menjadi kontrol sebuah sistem sosial yang dinilai tidak lagi sejalan atau selaras. Kritik sosial muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap realitas yang seharusnya. Menurut Wellek dan Warren (dalam Pradopo, 2011: 9) kritik sastra ialah ilmu sastra yang berusaha menyelidiki karya sastra dengan langsung menganalisis, memberi pertimbangan baik-buruknya karya sastra, bernilai seni atau tidaknya. Pada penelitian ini kritik sosial dalam naskah drama dalam *Pilkades* karya Al Galih terbagi menjadi tiga bentuk yaitu kritik terhadap asmara, kritik terhadap politik dan kritik terhadap etnik.

Kritik Terhadap Asmara

Naskah drama *Pilkades* karya Al Galih menceritakan kisah asmara La Seno dan Sorume serta politik antara Langgai dan La Murhum membawa La Seno dan Sorume ke dalam masalah yang pelik. Dalam naskah drama *Pilkades* Al Galih menghadirkan kritik terhadap perilaku anak muda dalam menjalin hubungan asmara melalui tokoh La Seno dan Sorume yang melakukan perilaku seksual. Seperti terlihat pada kutipan berikut.

Mowuro :

“Iya Pak. Aku melihat La Seno dan Sorume dua-dua di kebun pepaya. Meskipun remang-remang tetapi aku benar-benar dapat melihatnya. Tidak lama kemudian, La Seno tiba-tiba memetik buah pepaya Sorume, dua buah dengan dua tangan. Sungguh pak, copot biji matakmu kalau bohong (Galih, 2017: 1).”

Kutipan di atas menggambarkan kesaksian Mowuro yang telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mowuro melihat La Seno memetik buah pepaya Sorume di kebun pepaya. Buah pepaya dalam hal ini merujuk pada payudara.

Al Galih juga menghadirkan kalosara sebagai lambang persatuan dan persatuan bagi suku Tolaki yang dianggap sakral. *Kalosara* digunakan dalam rangka penyelesaian masalah secara hukum adat, merupakan suatu peristiwa sakral bagi masyarakat etnik Tolaki dalam menyelesaikan permasalahan. Tradisi *kalo* memiliki makna dan peranan penting dalam setiap kegiatan sebagai tradisi dan budaya orang Tolaki. *Kalo* menjadi penting karena memiliki fungsi 1) sebagai simbol, atau konsep tradisi dan kebudayaan; sebagai ide dalam kebudayaan Tolaki dan kenyataan dalam kehidupan mereka, 2) sebagai fokus dan pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan Tolaki, 3) sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral, 4) sebagai pemersatu untuk pertentangan konseptual dan sosial dalam kehidupan.

Selain itu, *kalo* sebagai tradisi masyarakat Tolaki dianggap mewakili wujud ideal dari kebudayaan yang meliputi: (1) Bahasa dan lambang komunikasi, *kalo* sebagai bahasa. (2) Sistem ekonomi tradisional, *kalo* sebagai penjaga tanaman, asas distribusi dalam sistem mata pencaharian. (3) Sistem teknologi tradisional, *kalo* sebagai model dan bentuk peralatan tradisional dan teknik mengikat. (4) Sistem pengetahuan, *kalo* sebagai konsep mengenai struktur alam nyata. (5) Sistem religi, *kalo* sebagai konsepsi mengenai struktur alam gaib. (6) Organisasi sosial dan kemasyarakatan, *kalo* sebagai asas organisasi, kerajaan, politik, dan pemerintahan. (7) Kesenian, *kalo* sebagai pola, hiasan, dan teknik menari.

Secara khusus, *kalo* dalam golongan masyarakat tertentu menempati posisi pada tingkatan tertentu, yaitu pada tingkat nilai budaya *kalo* terdapat pada setiap upacara-upacara adat. Pada tingkat norma adat, *kalo* menjadi nilai budaya yang mengikatkan peranan tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Pada tingkatan sistem hukum, *kalo* diberlakukan sebagai hukum adat. Pada tingkat aturan khusus, *kalo* mengatur aktifitas yang jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan (Rahmawati dkk, 2010: 138). Hal ini terdapat pada kutipan dialog berikut.

Ketua adat :

. . .“Sebagaimana telah kita ketahui bersama. Menyangkut kasus tempo hari, yakni pelecehan seksual yang telah dilakukan La Seno terhadap Sorume, malam ini juga kita akan menyelesaikannya secara adat. Dan selaku ketua adat, sebelum saya menjatuhkan keputusan adil terhadap perkara itu, saya persilahkan Mowuro lebih dulu menyatakan kesaksiannya.”

. . . “Inggomiu seluruhnya. Jadi, berdasarkan kesaksian Mowuro tadi. Maka ijinlanlah saya selaku ketua adat, menjatuhkan keputusan terhadap kasus pelecehan seksual ini. Berdasarkan hasil musyawarah saya dengan dewan adat, agar kesalahan yang dilakukan La Seno tidak pernah terjadi lagi dan membuat aib di desa kita, maka dewan adat bersepakat untuk menaikkan tarif denda sebanyak empat puluh kali lipat. Untuk itu, berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, La Seno diharuskan membayar uang denda sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.”. . .

Ketua Adat :

“Jika kedua belah pihak telah menerimanya, saya persilahkan kedua belah pihak atau yang mewakili menyentuh kalosara ini.”

La Murhum dan Sartina segera menyentuh Kalosara itu. Sedang semua warga yang hadir menyentuh pundak orang yang ada didekatnya.

“Saya harap semua untuk mengikutinya. *Inae Konasara, iye pinesara. Inae liasara, iye pinekasara.*” Maka semua warga segera saja mengikuti ucapan ketua adat tersebut. “Barang siapa yang mematuhi adat, dia akan dihormati. Barang siapa melanggar adat, dia akan dikucilkan. Dan karena keputusan adat telah saya jatuhkan, maka kalian semua harus menghormatinya.”

Ketua adat lalu menyalami tamu-tamunya. Lampu perlahan padam. Semua pemeran keluar dan kru panggung mengeluarkan perabotan. Tidak berselang lama lampu menyala lagi. La Seno dan Sorume segera masuk, berlari mutar keliling panggung lalu berhenti di titik cahaya (Galih 2017: 53-55).

Berdasarkan kutipan di atas, *Kalosara* pada suku Tolaki dianggap sebagai suatu yang wajib dan sakral keberadaannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih, pada babak akhir diberlangsungkan sidang adat untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual oleh La Seno dengan ritual *Kalosara*.

Kritik Terhadap Politik

Politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, politik juga berarti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (KBBI V). Perpolitikan bangsa Indonesia dewasa ini sedang dalam keadaan panas dengan diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak beberapa saat lalu. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tentu politik sudah bukan menjadi hal yang luar biasa. Politik sudah menjadi bagian dalam hidup bangsa Indonesia mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Politik sangat erat kaitannya dengan demokrasi, tanpa keduanya maka kebijakan tidak akan lahir.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi. Pelaksanaan pemilu menjadi kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih perwakilan yang akan mengambil kebijakan pemerintahan dan juga merupakan kepentingan bagi rakyat. Pemilu menjadi bagian penting dari politik guna menyelenggarakan kekuasaan dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Kritik terhadap politik yang terdapat dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih yaitu kritik terhadap pelanggaran kampanye (politik uang), biaya politik, politik kesukuan dan dinasti politik. Kritik terhadap politik sangat penting dilakukan ketika sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ditandai dengan setiap warga negara berkesempatan berperan aktif serta kebebasan memilih perwakilan yang akan mengambil kebijakan negara.

Politik Uang

Politik uang sudah bukan menjadi rahasia dalam dunia perpolitikan Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tenggara pada khususnya. Politik uang merupakan salah satu pelanggaran kampanye dalam pemilu berupa suap atau pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu atau kandidat yang akan bertarung dalam pesta demokrasi. Politik uang akan membuat pemilih kehilangan hak bebas memilih sesuai dengan pilihan berdasarkan hati nurani. Selain itu, politik uang membuat pemilih tidak lagi mempertimbangkan kandidat yang akan dipilihnya berdasarkan visi dan misi serta rekam jejak. Praktik politik uang di Sulawesi Tenggara tumbuh dan berkembang dengan suburnya, terlebih dalam pemilihan legislatif.

Kritik terhadap politik uang diajukan oleh Al Galih sebagai pengarang ke dalam sebuah karya sastra naskah drama *Pilkades*. Pengarang menggambarkan Sartina yang mengubah kesaksian Mowuro dengan tujuan menaikkan denda yang akan dibebankan kepada La Seno untuk dijadikan modal politik suaminya. Hal ini terlihat seperti dalam kutipan berikut:

Sartina :

“Apa? Kamu mau buah pepaya putrimu sendiri dibayar murah? Terus modal untuk politik? Pak, ini bukan jamannya seratus ribu, ini jamannya dua ratus ribu satu kepala.” (Galih, 2017: 15).

Pengarang menggambarkan kondisi masyarakat pemilih yang rentan terhadap politik uang dengan satu pemilih dihargai dengan nominal dua ratus ribu rupiah. Hal tersebut menjadi hal biasa dalam masyarakat, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengharapkan kedatangan tim sukses membawa apa yang disebut dengan serangan fajar.

Biaya Politik

Tingginya biaya politik sudah bukan menjadi hal yang tabu, peserta pemilu harus mempersiapkan dana yang tidak sedikit jika akan terjun ke dalam dunia politik. Smilov dan toplak (dalam BAWASLU, 2018: 19) menjelaskan bahwa dampak pembiayaan politik dan kampanye yang mahal pada satu sisi dan tidak transparan dan akuntabel pada sisi yang lain terhadap korupsi politik sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa Timur. Biaya politik digunakan untuk sosialisasi peserta pemilu seperti kampanye. Adanya praktik politik uang juga mempengaruhi mahalnya biaya politik.

Biaya politik yang tinggi juga menjadi isu yang Al Galih hadirkan dalam karya naskah drama *Pilkades*. Diceritakan dalam naskah bahwa La Murhum tidak bersedia membayar mahal denda yang dibebankan kepada La Seno karena seyogianya uang yang dimiliki akan digunakan untuk modal dalam pemilihan kepada desa. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut

La Murhum:

“La Kapude fura ini pasti dikenai denda oleh adat. Biaya politik sangat mahal, jadi mulai sekarang irit-irit uang belanja. Jangan terlalu sering pergi ke kota membeli baju baru. Dan mulai besok tolong kau cari tahu kebenarannya, konon ketua adat doyan sama wanita cantik. Saya mau kasus yang dibuat La Kapude fura ini, ketua adat berpihak sama kita. Saya tidak mau bayar denda terlalu mahal. Kalau perlu, tidak perlu bayar denda sama sekali.” Pada La Seno. “Saya tidak mau tahu, kau

pulangkan anak orang sekarang juga.” La Murhum lalu masuk ke dalam (Galih, 2017: 10).

La Murhum:

...Biaya politik mahal, dan saya tidak mau menguras modal saya yang pas-pasan untuk membayar hasil perbuatanmu di kebun pepaya... (Galih, 2017: 27).

Terlihat dalam kutipan di atas Al Galih tidak menghadirkan La Murhum sebagai peserta pemilu yang mencari dana melalui pinjaman. Untuk memenuhi biaya politik yang tinggi La Murhum berusaha menekan istrinya agar tidak terlalu sering berbelanja. Selain itu, mengenai denda adat La Murhum berusaha memanfaatkan sisi buruk ketua adat yang gemar bermain serong untuk mengintimidasi agar ketua adat berpihak kepadanya. Keberpihakan ketua adat kepada La Murhum diharapkan mempengaruhi keputusan ketua adat mengenai denda yang akan dijatuhkan pada La Seno, dengan begitu La Murhum tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah besar bahkan La Murhum berharap tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk membayar denda.

Politik Kesukuan

Kekayaan bangsa Indonesia atas suku menjadi ancaman tersendiri bagi keutuhan bangsa yang disebabkan oleh sukuisme atau fanatisme kedaerahan dalam masyarakat plural. Hal inilah yang menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman akan konsep persatuan membuat fanatisme kesukuan akan terus bereksistensi terutama menjelang pemilu. Sukuisme merupakan paham atau praktik yang mementingkan suku bangsa sendiri (KBBI V), sukuisme atau fanatisme kesukuan cenderung dijadikan sebagai alat politik. Akibatnya, pemilih didoktrin atau dipengaruhi untuk memilih pemimpin berdasarkan sukunya bukan berdasarkan visi dan misi peserta pemilu.

Fanatisme kesukuan yang dijadikan sebagai alat politik banyak terjadi di Indonesia, tanpa terkecuali juga di Sulawesi Tenggara yang seringkali berhembus menjelang pemilihan umum. Masyarakat Sulawesi Tenggara mempunyai sebutan tersendiri untuk politik kesukuan yaitu dengan menyebutnya sebagai politik darat dan kepulauan. Sulawesi Tenggara terbagi menjadi dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan dengan identitas budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut seringkali dimanfaatkan segelintir orang untuk mempengaruhi masyarakat agar dalam memilih pemimpin atau pun pejabat publik lainnya sesuai dengan sukunya. Melihat adanya politik kesukuan yang hidup dalam masyarakat, pengarang pun

menuangkannya ke dalam karya sastra. Seperti terlihat dalam kutipan berikut:

Sartina :

“Pasti, suku kita ini menyebar sampai di ambon. Desa kita akan menjadi pusat perhatian. Coba saja dia kalau berani tidak berpihak pada sukunya sendiri. Pak, kita sedang bermain politik, bukan bermain ular tangga.”

Kutipan di atas menggambarkan intimidasi yang dilakukan Sartina kepada ketua adat apabila tidak berpihak kepadanya. Perlu diketahui bahwa Sartina dan ketua adat berasal dari suku yang sama sehingga Sartina menginginkan ketua adat berpihak kepadanya sebagai sesama suku. Keberpihakan ketua adat kepada Sartina akan membuat kasus perilaku seksual atas La Seno terhadap Sorume dimenangkan pihak Sorume dan Sartina ingin meraup keutung dari hal tersebut yang akan Sartina jadikan sebagai modal politik suaminya.

Dinasti Politik

Dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga untuk membangun kekuasaan politik. Dinasti politik membuat anggota keluarga ikut serta ke dalam sistem pemerintahan karena adanya keinginan untuk memegang kekuasaan.

Dinasti politik adalah suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa (KBBI V). Praktik dinasti politik banyak terjadi di Indonesia menjadi penyebab turunnya kualitas demokrasi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sangat mungkin terjadi dalam dinasti politik. Selain itu, kekuasaan pengambilan kebijakan cenderung dipengaruhi hubungan kekeluargaan. Isu dinasti politik juga menjadi hal yang diungkapkan pengarang dalam karya sastra, seperti terlihat pada kutipan berikut.

Sartina :

Tegas. “Pak! Ini bukan lagi jaman seratus ribu. Ini jaman dua ratus ribu satu kepala. Ingat, bukan hanya La Murhum lawan kita. Lawan kita yang satu ini duitnya banyak. Bayangkan saja, kemarin anaknya menang telak pemilihan RT. Kayaknya besar niat mereka membangun dinasti politik. Pak, kamu harus menang. Harus menang!”

Langgai :

“Harus menang? Kalau tidak?”

Sartina :

“Ya...pemilihan berikutnya aku yang maju. Kenapa sih kalau sekali-sekali aku duduk juga” (Galih, 2017: 47).

Terlihat pada kutipan di atas kecurigaan Sartina terhadap salah satu lawan politik suaminya yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa. Sartina curiga lawan politik suaminya akan membangun dinasti politik setelah anaknya menang telak dalam pemilihan RT. Kekhawatiran Sartina akan dinasti politik yang akan dibangun lawan politiknya mengharuskan suaminya untuk menang karena dinasti politik akan membatasi calon kepala daerah lain untuk berpolitik.

Kritik Terhadap Pelaksanaan Sidang Adat

Kritik terhadap pelaksanaan sidang adat dalam naskah drama *Pilkades* karya Al Galih yaitu kritik terhadap *kalosara* (*kalo*) atau hukum adat yang sudah tidak sesuai dengan tingkatan sistem hukum semestinya, yakni kesepakatan mengenai penyelesaian masalah, hasil dan segala sesuatunya murni secara adat dan tanpa campur tangan dari pihak dan faktor lain. Handrawan (Jurnal perspektif Vol. XXI No. 3 2016) sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menurut adat Tolaki terbagi menjadi 2 yaitu peohala dan pinakawi. Sanksi peohala yaitu pemberian ganti kerugian berupa uang, sarung dan kain kafan beserta isi-isi adat lainnya yang diberikan kepada pelaku tindak asusilaan ringan seperti pencabulan, pelecehan seksual. Sanksi pinakawi yaitu pernikahan yang dilakukan karena adanya pelanggaran adat yang dianggap melanggar norma-norma hukum adat dan hukum Islam yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual berat seperti pemerkosaan, dan perzinahan.

Dominasi ini akan semakin kental karena didukung oleh ideologi *kalo* sebagai simbol adat yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Tolaki. Lebih lanjut simbol *kalo* bisa menjadi alat legitimasi untuk melemahkan posisi masyarakat bawah, jika itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang tidak berpihak pada kelompok masyarakat tertindas dan juga perlindungan sistematis terhadap kelompok sosial tertentu (bangsawan). Dalam kondisi demikian, kekerasan struktural sangat mungkin terjadi, jika kelompok masyarakat tertentu dilemahkan potensi dan ditutup akses atas kebutuhan dasarnya dengan menggunakan simbol budaya (*kalo*) (dalam Zainal dan Suud, 2018).

Al Galih menghadirkan kritik terhadap *kalosara* atau hukum adat di dalam naskah drama *Pilkades* yang dalam pelaksanaannya telah terkontaminasi atau adanya indikasi campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam masyarakat Tolaki, dominasi elite adat dikategorikan sebagai suatu sistem kekerasan psikologi yang terjadi secara

samar. Secara psikologi, masyarakat (khususnya kelompok sosial bawah) dipengaruhi untuk tunduk dan patuh atas nama hukum dan peraturan secara halus. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut:

Ketua adat :

“Maaf sekali lagi. Saya terjepit, sangat terjepit dan perlu waktu panjang untuk melepaskan diri. La Murhum mengintimidasi saya dengan katola-kantola itu.”

... Sartina :

“Terimakasih. Saya menyambut hangat niat baik bapak. Menyangkut aksi mogok dan baca kinoho itu gampang diatur. Tapi... kapan sidang adatnya?”

Ketua adat :

“Besok malam.”

Sartina :

“Besok malam? Waktu yang tepat. Dan saya harap, La Seno dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa lebih mahal dari seharusnya yang ia bayar.”

Langgai :

“Tidak perlu juga semahal itu. Harus sesuai yang seharusnya.”

Sartina :

Tegas. “Pak! Ini bukan lagi jaman seratus ribu. Ini jaman dua ratus ribu satu kepala. Ingat, bukan hanya La Murhum lawan kita. Lawan kita yang satu ini duitnya banyak. Bayangkan saja, kemarin anaknya menang telak pemilihan RT. Kayaknya besar niat mereka membangun dinasti politik. Pak, kamu harus menang. Harus menang!” (Galih, 2017: 46-47).

Persoalan penegakan hukum menjadi masalah yang sangat krusial di negeri ini. Adanya kepentingan-kepentingan pribadi tidak jarang membuat penyelesaian masalah melalui jalur hukum negara dan hukum adat kurang menjunjung tinggi nilai keadilan yang menjamin persamaan hak setiap individu dan kebenaran dalam hukum. Hal tersebut dihadirkan Al Galih dalam naskah drama *Pilkades* melalui tokoh kepala adat yang memihak kepada salah satu pihak dan memenangkannya karena adanya kepentingan tersendiri bagi kepala adat tersebut.

Pemaksaan kepentingan kelompok dominan dan legitimasi selalu saja menjadi faktor utama penyebab konflik. Kelompok dominan (elite) memiliki peran yang sangat besar dalam menjamin stabilitas maupun cetusan konflik dalam masyarakat. Kaum elite menanamkan dominasinya menggunakan wacana psikologi yang tidak disadari oleh kelompok nirdominan sebagai

sebuah pemaksaan dan penindasan, bahkan menganggapnya sebagai sebuah kewajaran saja. Sesungguhnya ini adalah sebuah bentuk kekerasan atau lebih tepatnya kekerasan terlembaga atau kekerasan struktural. Kekerasan lembaga tidak terjadi secara kebetulan, tetapi didukung oleh bangunan sosial sebagai legitimasi atas kekuasaan. Legitimasi atas kekuasaan ini disebut dengan dominasi yang merupakan satu aspek penaklukan yang mengarahkan pada kekuatan hegemonik. Selain itu, faktor penyebab konflik adalah tidak adanya pengakuan (legitimasi) atas hak-hak yang sama dalam masyarakat (dalam Zainal dan Suud, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra Swingewood dengan metode kualitatif dengan menyertakan deskripsi sesuai isi naskah drama *Pilkades* karya Al Galih. Kemudian disusun dengan menganalisis menggunakan teori sosiologi sastra Alan Swingewood yang berfokus kepada karya sebagai refleksi sosial guna mengetahui kritik sosial yang diungkapkan Al Galih melalui karyanya yaitu naskah drama *Pilkades*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial yang dihadirkan oleh Al Galih sebagai pengarang naskah drama *Pilkades* berupa kritik terhadap hubungan asmara remaja, kritik terhadap politik meliputi politik uang, biaya politik, politik kesukuan dan dinasti politik. Selain kritik sosial politik, Al Galih juga menghadirkan kritik terhadap etnik berupa kritik terhadap pelaksanaan sidang adat dalam naskah drama *Pilkades* berupa hukum adat atau *kalosara* dalam masyarakat suku Tolaki.

DAFTAR PUSTAKA

BAWASLU, (2018). *Peraturan Bawaslu Pengawasan Kampanye Pemilu*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281.

Endraswara, Suwardi. (2011). *Metodologi Penelitian Sosiologi Sastra*. Yogyakarta. Penerbit CAPS.

Faruk. (2016). *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-moderenisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Galih, Al. (2017). *Pilkades: Naskah Komedi*. Alolama.

Handrawan. (2016). *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*. Jurnal Perspektif Vol. XXI No. 3 Tahun 2016.

- Karnanta, Kukuh Yudha. (2013). *Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jurnal Poetika Vol. 1 No. 1 Juli 2013.
- Moeljadi, David dkk. (2016). *KBBI V; Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima: Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Pradopo, Rachmat Djoko. (2011). *Prinsip-Prinsip Kritik Sastra*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmawati, dkk. (2010). *Inventarisasi Sastra Daerah Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Zainal, Asliah & Suud, Sudarmi. (2018). *Kekerasan Simbolik dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara*. Jurnal Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 13. No. 2 (November, 2018).